

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dari rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Sasaran Provinsi Kalimantan Timur 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD pembangunan 2013-2018, maka penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

##### 4.1.1. VISI

Visi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 5 (lima) tahun mendatang (2013 - 2018) adalah :

**“Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, Mendukung Kalimantan Timur Sejahtera”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan dalam 4 (empat) pilar visi pembangunan Sekretariat Daerah, yaitu :

- 1) **Kinerja prima** : Adalah Aparatur yang produktif, unggul memahami tugas pokok dan fungsi dalam rangka peningkatan produktifitas kerja;
- 2) **Pelayanan Prima** : Adalah pemberian pelayanan pemerintahan yang terbaik, handal dan profesional oleh semua jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya;
- 3) **Tata Pemerintahan Yang Baik** : Adalah Pemerintahan yang berprinsip pada keterbukaan Akuntabilitas,

Efektifitas, dan Efisieni menunjang Supremasi Hukum, dan membuka partisipasi masyarakat berdasarkan pengawasan dan profesionalisme kerja;

- 4) **Kalimantan Timur Sejahtera** : merupakan menifestasi kondisi yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur yang meliputi keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi, lahir dan bathin, meliputi rasa aman sentosa, makmur, sehat dan selamat dari segala macam gangguan, terpenuhinya kebutuhan dasar yang dicapai melalui implementasi berbagai kebijakan pembangunan daerah;

### 4.1.2. MISI

1. Mewujudkan perumusan kebijakan dan koordinasi, tugas dan fungsi **bidang pemerintahan;**  
( Asisten Pemerintahan )
2. Mewujudkan perumusan kebijakan dan koordinasi tugas dan fungsi **bidang ekonomi dan pembangunan;**  
( Asisten Ekonomi dan Pembangunan )
3. Mewujudkan perumusan kebijakan dan koordinasi tugas dan fungsi **bidang kesejahteraan rakyat ;**  
( Asisten Kesejahteraan Rakyat )
4. Mewujudkan perumusan kebijakan dan koordinasi tugas dan fungsi **bidang administrasi umum ;**  
( Asisten Administrasi Umum )

### 4.2. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

#### 4.2.1. Tujuan

Berdasarkan Misi Setda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang 2013-2018 adalah sebagai berikut :

**Misi Pertama** "Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, perbatasan, penataan wilayah dan kerjasama secara tertib, transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar pelaku pembangunan", dengan tujuan :

- (1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik ;
- (2) Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
- (3) Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama.

**Misi Kedua** " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah dan perekonomian yang semakin koordinatif, responsif, berkeadilan dan transparan ", dengan tujuan :

- (4) Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
- (5) Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel ;

**Misi Ketiga** "Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang sosial, hubungan masyarakat dan protokol yang berkeadilan, tepat sasaran, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik ", dengan tujuan :

- (6) Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat ;
- (7) Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalme dalam meningkatkan citra positif pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

**Misi Keempat** " Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang organisasi, keuangan, perlengkapan dan umum secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel ", dengan tujuan :

- (8) Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik ;

- (9) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel ;
- (10) Mewujudkan tata kelola asset barang milik daerah yang akuntabel dan transparan sebagai sarana dan prasarana penunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ;
- (11) Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi secara tertib dan teratur.

### 4.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada sebagai berikut :

- (1) Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik, sasarannya adalah :
  - a. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD;
  - b. Terselenggara Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan NIK Nasional ;
- (2) Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sasarannya adalah :
  - a. Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM ;
  - b. Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur / masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM ;

- (3) Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama, sasarannya adalah:
  - a. Meningkatnya kerjasama antar daerah ;
  - b. Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kabupaten/kota dan provinsi ;
  - c. Terlaksananya pembakuan nama rupa bumi di kabupaten/kota ;
- (4) Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, sasarannya adalah :
  - a. Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian ;
- (5) Mewujudkan pelayanan administrasi pembangunan daerah yang prima dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel, sasarannya adalah :
  - a. Terwujudnya pelayanan administrasi dan koordinasi perencanaan penganggaran pembangunan secara mantap ;
  - b. Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui ULP;
- (6) Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat, sasarannya adalah :
  - a. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kepala daerah bidang kesejahteraan rakyat ;
- (7) Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalme dalam meningkatkan citra positif pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya hubungan masyarakat dan protokol yang berkualitas ;
- (8) Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik, sasarannya adalah :
- a. Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel ;
- (9) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel, sasarannya adalah :
- a. Terlaksananya Pembinaan, kebijakan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah ;
  - b. Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas ;
- (10) Mewujudkan tata kelola asset barang milik daerah yang akuntabel dan transparan sebagai sarana dan prasarana penunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, sasarannya adalah :
- a. Tersedianya data aset yang akuntabel ;
- (11) Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi keuangan, sasarannya adalah :
- a. Terwujudnya pengelolaan administrasi umum
- Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, maka Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 dapat diuraikan sejumlah indikator sasaran sebagai berikut :

**Tabel 4. 1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas LPPD	Predikat LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	Persentase Administrasi kependudukan Kab/Kota yang memenuhi kategori lebih dari atau sama dengan "baik"	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
2.	Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	858	817	610	610	610	610
			Jumlah produk hukum yang didokumentasikan	858	817	610	610	610	610
		Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	Persentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	100	100	90	95	95	96



## REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

3.	Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama	Meningkatnya kerjasama antar daerah	Jumlah perjanjian kerjasama (MoU)	38	10	8	50	50	50
			Jumlah penegasan titik batas melalui pemaangan pilar batas utama (PBU)	-	-	-	5	5	5
4.	Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang ekonomi	-	-	-	100	100	100
			Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	-	-	-	8	8	8
5.	Mewujudkan Pelayanan Prima dalam rangka Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya pelayanan administrasi dan pengendalian pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	Persentase capaian program/kegiatan strategis yang sesuai rencana	75	90	90	90	90	90
6.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi bidang kesejahteraan rakyat	Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang kesra	-	-	-	90	90	90

## REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

			Persentase target ketercapaian program/kegiatan bidang kesra	-	-	-	85	85	85
7.	Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalisme dalam meningkatkan citra positif Pemprov Kaltim	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas.	Persentase berita positif pembangunan	50	55	60	65	70	75
8.	Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	Skor SKM rata-rata unit layanan	68	70 baik	75 baik	79 sangat baik	82 (sangat baik)	85 (sangat baik)
			Nilai Akuntabilitas Provinsi	70,75	72,00	74,00	76,00	8,00	80,00
9.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib dan Akuntabel.	Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas	Ketepatan Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Opini terhadap laporan keuangan Pemerintahan daerah oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

10	Mewujudkan tatakelola asset barang milik daerah yang akuntabel dan transparan sebagai sarana dan prasarana penunjang kinerja penyelenggaraan pemda	Terpenuhinya kebutuhan aset	- Persentase pengadaan asset sesuai dengan kebutuhan	100	100	100	100	100	100
			- Persentase SKPD yang mampu mengelola asset dengan baik	100	100	100	100	100	100
11	Mewujudkan Pelayanan Prima dalam rangka pelaksanaan Administrasi Umum, Keuangan, Rumah Tangga, Sandi dan kasi secara tertib & teratur	Terwujudnya pelayanan pengelolaan Administrasi Umum	Skor SKM rata-rata pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan setda, keuangan setda, sarana komunikasi dan telekomunikasi.	75	80	85	87.5	87.5	87.5

### 4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

#### 4.3.1. Strategi Setda Provinsi Kalimantan Timur

Untuk menentukan strategi yang diterapkan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2013-2018 dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu mempertimbangkan dan memperhatikan adanya faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Strategi kunci untuk Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan ;

2. Menerapkan e-government dalam manajemen pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat ;
3. Meningkatkan pembinaan kepada SKPD dan kabupaten/kota dalam menyusun dan membuat produk hukum seperti Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah ;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil kerjasama dan pengembangan kerjasama dengan mitra kerjasama yang tepat dan potensial ;
5. Memfokuskan secara jelas segmen-segmen batas yang strategis dan mendesak untuk dapat segera dituangkan dalam kebijakan penegasan batas ;
6. Meningkatkan pengelolaan penyusunan rencana program pembangunan Sekretariat Daerah ;
7. Meningkatkan evaluasi dan analisis pelaksanaan pembangunan ;
8. Implementasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri ;
9. Melakukan sinergitas bidang perekonomian daerah ;
10. Melakukan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat secara intensif ;
11. Melakukan kerjasama yang harmonis dengan penerapan pola Koordinasi, Implikasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) melalui jejaring kehumasan ;
12. Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya Kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
13. Penerapan pola Koordinasi, Implikasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (POLA KISS) ;

14. Penataan dan Pendayagunaan Sumber daya Aparatur.
15. Peningkatan Standar Pelayanan ;
16. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja ;
17. Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik ;
18. Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi/Kab/Kota ;
19. Penerapan SIMBADA secara efektif dan efisien ;
20. Meningkatkan penataan administrasi umum.

**Tabel 4. 2.**  
**Penentuan Strategi**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
1. Meningkatnya kualitas LPPD	1. Predikat LPPD	1. Mengoptimalkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Terselenggaranya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan NIK Nasional	2. Persentase Administrasi kependudukan Kab/Kota yang memenuhi kategori lebih dari atau sama dengan "baik"	2. Menerapkan e-government dalam manajemen pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat
3. Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	3. Jumlah produk hukum yang ditetapkan	3. Meningkatkan pembinaan kepada SKPD dan kabupaten/kota dalam menyusun dan membuat produk hukum seperti Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
4. Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	4. Persentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	4. Meningkatkan fasilitas bantuan hukum dan masyarakat sadar hukum
		5. Meningkatkan kesadaran kab/kota untuk melakukan evaluasi dan pembatalan produk hukum agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
5. Meningkatnya kerjasama antar daerah	5. Jumlah perjanjian kerjasama (MoU)	

## REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

<p>5. Meningkatnya kepastian batas wilayah antar Kab/Kota dan Provinsi</p>	<p>6. Jumlah penegasan titik melalui pemasangan pilar batas utama</p>	<p>6. Memfokuskan secara jelas segmen-segmen batas yang strategis dan mendesak untuk dapat segera dituangkan dalam kebijakan penegasan batas</p>
<p>6. Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian</p>	<p>7. Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang ekonomi</p>	<p>7. Melakukan sinergitas bidang perekonomian daerah</p>
	<p>8. Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti</p>	
<p>7. Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan</p>	<p>9. Persentase program/kegiatan yang strategis sesuai rencana</p>	<p>8. Meningkatkan pengelolaan penyusunan rencana program pembangunan Sekretariat Daerah</p>
<p>8. Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat</p>	<p>10. Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang kesra</p>	<p>9. Melakukan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat secara intensif</p>
	<p>11. Persentase target ketercapaian Program/kegiatan bidang kesra</p>	
<p>9. Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas</p>	<p>12. Persentase berita positif pembangunan daerah.</p>	<p>10. Melakukan kerjasama yang harmonis dengan penerapan pola Koordinasi, Implikasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) melalui jejaring kehumasan</p>

## REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

10. Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, edisien dan akuntabel	13. Skor SKM rata-rata unit layanan 14. Nilai Akuntabilitas Provinsi	11. Melakukan kerjasama yang harmonis dengan penerapan pola Koordinasi, Implikasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS)
11. Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas	15. Ketepatan waktu 16. Opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK	12. Penyusunan APBD sesuai dengan jadwal
13. Terpenuhinya kebutuhan asset	17. Persentase pengadaan asset yang sesuai dengan kebutuhan 18. Persentase SKPD yang mampu mengelola asset dengan baik	13. Penerapan SIMBADA secara efektif dan efisien
14. Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	19. Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, sarana komunikasi dan telekomunikasi	14. Peningkatan Standar Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi.



### 4.3.2. Kebijakan Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur

1. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penataan urusan pemerintahan;
2. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mengacu pada pelaksanaan SIAK dan NIK Nasional;
3. Membangun kesamaan pemahaman akan pentingnya azas kepastian hukum, setiap pelaksanaan tugas dan fungsi di SKPD;
4. Membangun kesamaan pemahaman akan pentingnya untuk melakukan evaluasi dan pembatalan produk hukum Kabupaten/Kota;
5. Meningkatkan akurasi dan koordinasi data survey sebagai bahan pengembangan data dan informasi batas wilayah, penataan daerah dan kerjasama yang komprehensif;
6. Melakukan sinergitas dengan pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi daerah;
7. Penyelenggaraan sistem pembinaan, pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terencana, terkoordinir dan komprehensif;
8. Peningkatan koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat;
9. Peningkatan kerjasama kehumasan dan keprotokolan dalam akses penyediaan informasi publik;
10. Peningkatan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) ;

11. Penerapan ketatalaksanaan yang transparan ;
12. Peningkatan kapasitas kelembagaan ;
13. Peningkatan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) ;
14. Pengembangan dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
15. Menyediakan sistem dan informasi pengelolaan keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
16. Melakukan koordinasi untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan;
17. Peningkatan penerapan SIMBADA ;
18. Peningkatan standar pelayanan administrasi keuangan.

**Tabel 4. 3.**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan**  
**Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2013 – 2018**

Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, Mendukung Kalimantan Timur Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
<p><b>MISI 1 :</b> Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah <b>di bidang tata pemerintahan, hukum, perbatasan, penataan wilayah dan kerjasama</b> secara tertib, transparan dan akuntabel sehingga tercipta sinergitas antar pelaku pembangunan</p>				
<p><b>Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman dan demokratis dilandasi prinsip Tata Pemerintahan yang baik</b></p>	1. Meningkatnya kualitas LPPD	1. Mengoptimalkan koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan	1. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penataan urusan pemerintahan.	<b>Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah</b>
	2. Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	2. Menerapkan e-government dalam manajemen pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat	2. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mengacu pada pelaksanaan SIAK dan NIK Nasional.	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>
<p><b>Meningkatkan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat</b></p>	3. Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	3. Meningkatkan pembinaan kepada SKPD dan Kab/Kota dalam menyusun dan membuat produk hukum seperti Perda, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	3. Membangun kesamaan pemahaman akan pentingnya azas kepastian hukum setiap pelaksanaan tugas dan fungsi di SKPD	<p><b>Program Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah Provinsi</b></p> <p><b>Program Peningkatan Legislasi Daerah (PROLEGDA)</b></p>

## REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

				<p><b>Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bantuan Hukum dan HAM</b></p> <p><b>Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota.</b></p>
	4. Terwujudnya bantuan hukum, dan aparatur/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	4. Meningkatkan fasilitas bantuan hukum dan masyarakat sadar hukum		<b>Program Bantuan Hukum dan HAM</b>
		5. Meningkatkan kesadaran kab/kota untuk melakukan evaluasi dan pembatalan produk hukum agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.	4. Membangun kesamaan pemahaman akan pentingnya untuk melakukan evaluasi dan pembatalan produk Hukum Kab/Kota.	<b>Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota.</b>

## REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

<p><b>Mewujudkan kepastian batas antar wilayah, penataan daerah dan optimalisasi kerjasama</b></p>	<p>5. Meningkatnya kerja sama antar daerah</p>	<p>6. Memfokuskan secara jelas segmen-segmen batas yang strategis dan mendesak untuk dapat segera dituangkan dalam kebijakan penegasan batas</p>	<p>5. Meningkatkan akurasi dan koordinasi data survey sebagai bahan pengembangan data dan informasi batas wilayah, penataan daerah dan kerjasama yang komprehensif.</p>	<p><b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b></p>
	<p>6. Meningkatnya kepastian batas wilayah antar Kab/Kota dan Provinsi</p>			
<p><b>MISI 2 :</b> Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah <b>di bidang perekonomian dan pembangunan daerah</b> yang semakin koordinatif, responsif, berkeadilan dan transparan</p>				
<p><b>Mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah</b></p>	<p>7. Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian</p>	<p>7. Persentase Penyaluran Raskin</p>	<p>6. Melakukan sinergitas pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi daerah</p>	<p><b>Program Raskin</b> <b>Program Peningkatan Sasaran dan Efektifitas Manajemen Pemerintah</b></p>
<p><b>Mewujudkan Pelayanan Prima dalam rangka Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan</b></p>	<p>8. Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan</p>	<p>8. Meningkatkan pengelolaan penyusunan rencana program pembangunan Sekretariat Daerah</p>	<p>7. Penyelenggaraan sistem pembinaan, pengendalian pelaksanaan pembangunan yang terencana, terkoordinir dan komprehensif.</p>	<p><b>Program Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan</b></p>

## REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

<b>yang transparan dan akuntabel</b>				
<b>MISI 3</b> : Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah <b>di bidang sosial, hubungan masyarakat dan protokol</b> yang berkeadilan, tepat sasaran, profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik				
<b>Mewujudkan kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat</b>	9. Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	9 Melakukan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat secara intensif	8. Peningkatan koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi bidang Kesejahteraan masyarakat</b>
<b>Mewujudkan hubungan masyarakat dan keprotokolan secara profesionalisme dalam meningkatkan citra positif Pemprov Kaltim</b>	10. Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	10 Melakukan kerjasama yang harmonis dengan penerapan pola Koordinasi, Implikasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) melalui Jejaring Kehumasan	9. Peningkatan kerjasama kehumasan dan keprotokolan dalam akses penyediaan informasi publik	<b>Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan</b>
<b>MISI 4</b> : Mewujudkan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah <b>di bidang organisasi, keuangan, perlengkapan dan umum</b> secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>
<b>Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel menuju pemerintahan</b>	11. Terwujudnya organisasi tata laksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien, dan	11. Melakukan kerjasama yang harmonis dengan penerapan pola Koordinasi, Implikasi, Sinkronisasi	10. Pengembangan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	<b>Program Peningkatan Kualitas manajemen berbasis kinerja</b>

## REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

yang baik	akuntabel	dan Simplifikasi (KISS)		
<b>Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel</b>	12. Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas	12. Penyusunan APBD sesuai dengan jadwal	11. Menyediakan sistem dan informasi pengelolaan keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota  12. Melakukan koordinasi untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>
<b>Mewujudkan tatakelola asset barang milik daerah yang akuntabel dan transparan sebagai sarana dan prasarana penunjang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</b>	13. Terpenuhinya kebutuhan aset	13. Penerapan SIMBADA secara efektif dan efisien	11. Peningkatan penerapan SIMBADA	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
<b>Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi secara tertib dan teratur</b>	14. Terwujudnya pelayanan pengelolaan Administrasi Umum,	13. Peningkatan Standar Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi	12. Peningkatan standar pelayanan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, sandi dan telekomunikasi	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>

**Tabel 4.4.**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Setda Provinsi Kalimantan Timur**

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) SEKRETARIAT DAERAH							
No.	Indikator Kinerja	TARGET					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Predikat LPPD	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
2	Nilai Akuntabilitas Provinsi	70,75	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
3	Opini terhadap laporan keuangan Pemerintahan Daerah oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



## REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

<b>KRONOLOGI PENYUSUNAN RENSTRA SETDA 2013-2018 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2015</b>			
<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>TEMPAT</b>
1	Rapat Penyusunan Draft Renstra	Juni – Oktober 2013	Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda
2	Kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Renstra Setda Prov. Kaltim	6 Nopember 2013	Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung
3	Kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Renstra Setda Prov. Kaltim	12 Februari 2013	Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang
4	Rapat Tim Penyusunan Renstra (Narasumber Setda Prov. Jawa Tengah)	3 April 2014	RSUD Kanujoso Djatiuwibowo, Balikpapan
5	Finalisasi Renstra Setda Prov. Kaltim	30 April 2014	Ruang Rapat Lantai II Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta.
6	Konsultasi hasil Finalisasi Renstra Setda Prov. Kaltim	17 Juli 2014	KemenPAN dan RB, Jakarta
7	Perbaikan Renstra	19 Agustus 2014	Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda
8	Paparan Renstra Setda Prov. Kaltim 2013 - 2018	9 Februari 2015	Ruang Rapat Plt. Sekda Lantai II Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
9	Rapat Evaluasi Renstra Setda Prov. Kaltim	16 Februari 2015	Ruang Rapat Daya Taka Lantai III Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
10	Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018	23 Nopember 2015	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS di Jakarta.

## REVIEW RENSTRA SETDA KALTIM

11	Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018	27-28 Nopember 2015	Ruang Rapat Lantai V Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta.
12	Evaluasi Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018	4 Desember 2015	Ruang Kerja Kepala Bagian Analisis dan Pengkajian Pembangunan
13	Persentasi Review Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018	7 Desember 2015	Ruang Rapat Plt. Sekda Lantai II Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
14	Tanda tangan Plt. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	29 Desember 2015	Ruang Kerja Plt. Sekda Prov. Kalimantan Timur